



Determinan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Pulau Sumatera

Maulana Akbar¹, Periansya^{2*}, Nurhasanah³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya

* E-mail Korespondensi: periansya@polsri.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 15-09-2025

Revision: 25-09-2025

Published: 30-09-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1189

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan *Leverage* terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah kota di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 34 kota di Pulau Sumatera selama periode 2020–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, kekayaan daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara ukuran pemerintah daerah dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dan pengelolaan dana transfer yang efisien menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan daerah dalam merancang strategi fiskal berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Kata Kunci: kemandirian keuangan, kekayaan daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah, *Leverage*

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effect of regional wealth, intergovernmental transfers, regional government size, and Leverage on the financial independence of city governments in Sumatra Island. The study uses secondary data from local government financial reports (LKPD) of 34 cities during the 2020–2023 period. Panel data regression with Fixed Effect Model (FEM) was applied. The results show that all independent variables simultaneously have a significant effect on financial independence. Partially, regional wealth and balancing funds have a significant effect, while government size and Leverage do not. These findings indicate that optimizing local revenue and effectively managing transfer funds are key to enhancing fiscal independence. The

Acknowledgment



study provides important implications for policymakers in designing sustainable fiscal strategies based on local potential.

Key word: *financial independence, regional wealth, intergovernmental transfers, government size, Leverage*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri dengan memanfaatkan potensi daerah guna mendukung pembangunan. Namun, implementasinya kerap menemui kendala, termasuk ketimpangan fiskal dan ketergantungan pada dana pusat.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Sumber pendapatan lainnya, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman. Tingkat kemandirian ini menunjukkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada dana eksternal serta menggambarkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2014). Namun secara umum, Sumber pendanaan APBD masih didominasi oleh transfer dana dari pemerintah pusat dan Sumber lain yang diatur dalam perundang-undangan. Ketergantungan tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga daerah menjadi kurang mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan di sebagian besar kota di Indonesia masih belum mandiri secara fiskal



Gambar 1. Grafik Kemandirian Kota di Pulau Sumatera

Sumber : BPK RI 2020-2023 diakses 2025

Berdasarkan data rasio kemandirian keuangan, dari 34 kota di Pulau Sumatera, hanya satu kota yang tergolong mandiri tinggi, sedangkan sebagian besar, yaitu 24 kota, masih berada pada kategori sangat rendah. Kota Batam mencatat tingkat kemandirian tertinggi (97,70%), sementara Kota Gunungsitoli terendah (3,79%). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kota di Sumatera belum mencapai kemandirian fiskal yang optimal dalam mendukung otonomi daerah.

Kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kekayaan daerah (PAD), dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan *Leverage*. PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah, di mana PAD yang tinggi menunjukkan kemandirian fiskal yang lebih baik. Namun, pengaruh faktor-faktor tersebut tidak selalu konsisten. Dana perimbangan dapat mendukung pembiayaan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal. Ukuran pemerintah daerah yang besar mencerminkan kapasitas fiskal, namun bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan efisien. *Leverage* yang dikelola baik dapat menjadi Sumber pembiayaan produktif, tetapi jika berlebihan justru membahayakan stabilitas fiskal. Oleh karena itu, optimalisasi Sumber daya dan penerapan kebijakan fiskal yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

Tingkat kekayaan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kemandirian fiskal. PAD sebagai indikator kekayaan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mutaali, (2025) menyatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD, maka semakin tinggi pula kemandirian daerah. Noviyanti et al (2016) dan Martini et al. (2019) menunjukkan hubungan positif antara kekayaan daerah dan kinerja

keuangan. Namun, (Rosadi, 2021) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan di Kota Tasikmalaya.

Dana perimbangan juga berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dana ini berasal dari APBN dan terdiri dari DAU, DAK, dan DBH (UU No. 33 Tahun 2004). Walaupun dapat membantu pembiayaan daerah, ketergantungan yang tinggi terhadap dana ini justru menghambat kemandirian fiskal (Nurjanah, 2025). Penelitian (Machfud et al., 2021) menunjukkan pengaruh negatif signifikan, sedangkan Nurliza et al. (2020) menemukan bahwa pengaruhnya tidak signifikan terhadap kemandirian daerah.

Ukuran pemerintah daerah yang direpresentasikan melalui total aset juga dapat memengaruhi tingkat kemandirian fiskal. Aset yang besar berpotensi memperkuat fungsi pemerintahan, namun bisa menjadi beban jika tidak dikelola secara efektif. Siregar et al. (2017) menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian, sedangkan Rofiq et al. (2021) menemukan hasil sebaliknya.

Leverage, yang diukur melalui rasio utang terhadap aset, menunjukkan sejauh mana pembiayaan daerah bergantung pada pihak eksternal. *Leverage* tinggi mencerminkan tingginya beban utang dan rendahnya kemandirian fiskal (Manafe et al., 2023). (Santoso, 2018) menemukan pengaruh negatif *leverage* terhadap kemandirian keuangan, sementara (Islami et al., 2020) menemukan bahwa *leverage* dapat berdampak positif jika dikombinasikan dengan pajak daerah dalam meningkatkan kinerja fiskal.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kemandirian keuangan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan yang lebih fokus dan menyeluruh. Penelitian ini mengangkat isu tersebut dengan pendekatan data panel terhadap 34 kota di Pulau Sumatera selama periode 2020–2023. Penelitian ini juga memperkenalkan modifikasi variabel, yaitu penggunaan kekayaan daerah sebagai proksi PAD dan kemandirian fiskal sebagai variabel dependen.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada kajian ini ialah pendekatan kuantitatif. dan memanfaatkan data sekunder sebagai Sumber informasi. Kajian ini berfokus pada kota di pulau Sumatera yang berjumlah 34 Kota dengan periode 2020-2023. Pada kajian ini ada dua jenis variabel, yakni variabel independen yang berfungsi sebagai faktor yang memengaruhi, serta variabel dependen

2903

yang merupakan akibat dari variabel independen (Sugiyono, 2022) Data yang dipakai pada kajian ini ialah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan memakai teknik pengumpulan data dokumentasi yang berSumber dari BPK dari situs resmi e-ppid.bpk.go.id , di bantu alat program *Econometric Views* (Eviews) versi 12 sebagai pengolah data. Teknik yang diimplementasikan untuk mengambil sampel ialah sampling jenuh, yang berarti seluruh elemen dalam populasi dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2022).

HIPOTESIS :

- H1: Kekayaan Daerah berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah kota di pulau Sumatera
- H2: Dana Perimbangan berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah kota di pulau Sumatera
- H3: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah kota di pulau Sumatera
- H4: *Leverage* berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah kota di pulau Sumatera

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Date: 05/27/25 Time: 14:47 Sample: 2020 2023					
	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.230442	25.71267	27.43950	28.63031	0.022961
Median	0.167450	25.44795	27.32420	28.34830	0.012000
Maximum	0.977000	28.52420	28.81300	31.24080	0.200100
Minimum	0.024200	23.51060	26.82020	27.35200	0.000700
Std. Dev.	0.182682	1.103137	0.457711	0.818169	0.031660
Skewness	1.724718	0.659683	1.136679	1.273542	3.224288
Kurtosis	6.002925	2.788942	3.655199	4.420510	15.14446
Observations	136	136	136	136	136

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 3, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki jumlah observasi sebanyak 136. Kemandirian keuangan daerah (Y) memiliki nilai minimum 0,0242 (terendah di Kota Padangsidimpuan), maksimum 0,9770 (tertinggi di Kota Batam), dengan rata-rata 0,2304 dan simpangan baku 0,1827. Kekayaan daerah (X1), yang diukur melalui PAD, memiliki nilai minimum 23,5106 dan maksimum 28,5242, rata-rata

25,7127 serta simpangan baku 1,1031. Dana perimbangan (X2) memiliki nilai minimum 26,8200 dan maksimum 28,8130, dengan rata-rata 27,4395 dan simpangan baku 0,4577. Ukuran pemerintah daerah (X3), diukur berdasarkan total aset, memiliki nilai minimum 27,3520 dan maksimum 31,2480, dengan rata-rata 28,6303 dan simpangan baku 0,8182. *Leverage* (X4), diukur dari rasio utang terhadap ekuitas, memiliki nilai minimum 0,0007 dan maksimum 0,2001, dengan nilai rata-rata 0,0230 dan simpangan baku 0,0317.

Pemilihan Model Data Panel

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	36.605846	(32,89)	0.0000
Cross-section <i>Chi-square</i>	333.967762	32	0.0000

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Merujuk hasil uji Chow yang disajikan dalam Tabel 2, model *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih sebagai model terbaik.

Uji Hausman

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

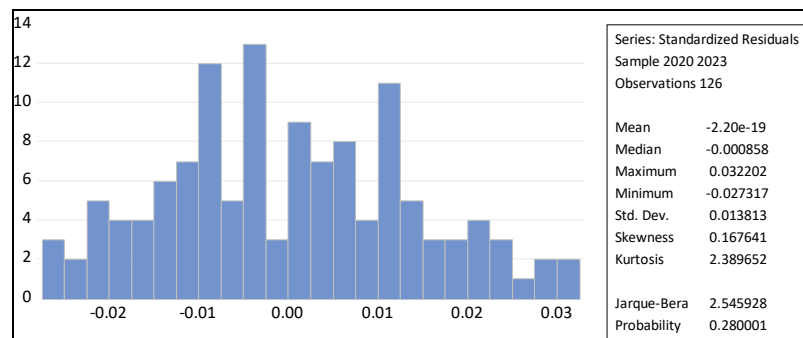
Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.171127	4	0.0000

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Merujuk hasil uji Hausman dalam Tabel 3, model yang paling sesuai ialah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dikatakan berdistribusi normal apabila *nilai Asymp Sig (2 tailed)* dari perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dinyatakan normal.

**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data**

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Dari hasil perhitungan didapat nilai Prob. sebesar 0,280001 (dapat dilihat pada Gambar 2) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas sudah terpenuhi.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas pada data apabila nilai pada tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10

Tabel 4 Hasil Uji Multikolonearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.793822	0.686834	-0.007285
X2	0.793822	1.000000	0.797365	0.046083
X3	0.686834	0.797365	1.000000	0.102723
X4	-0.007285	0.046083	0.102723	1.000000

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel bebas memiliki nilai korelasi di bawah 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dan asumsi bebas multikolinearitas telah terpenuhi.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah data yang ada terdapat gejala heterokedastisitas atau tidak, data menunjukkan terjadi heterokedastisitas apabila nilai signifikan dari uji glejser menunjukkan nilai signifikan yang dihasil lebih kecil dari 0,05

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.340854	0.105444	-3.232555	0.0017
X2	0.624164	0.342179	1.824084	0.0715
X3	0.207862	0.421701	0.492913	0.6233
X4	0.000522	0.000927	0.563166	0.5747
C	-1.644443	1.437776	-1.143741	0.2558

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas pada variabel X1 (Prob. < 0,05), yang mengindikasikan residual tidak homogen. Oleh karena itu, untuk memperoleh estimasi yang efisien, digunakan metode regresi FEM terboboti (WLS) sesuai dengan rekomendasi Gujarati (2008) dan (Baltagi, 2005).

Uji Analisis Regresi Data Panel

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	2.548941	0.101128	25.20507	0.0000
X2	-3.008918	0.305749	-9.841149	0.0000
X3	0.336512	0.444364	0.757289	0.4509
X4	-0.001036	0.000568	-1.824921	0.0714
C	0.762572	1.063718	0.716893	0.4753

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar 0,762 mengindikasikan kemandirian keuangan akan bernilai 0,762 saat seluruh variabel independen bernilai nol. Koefisien β_1 sebesar 2,548 menunjukkan bahwa peningkatan kekayaan daerah sebesar 1% akan meningkatkan kemandirian keuangan sebesar 2,548. Koefisien β_2 sebesar -3,008 berarti peningkatan dana perimbangan akan menurunkan kemandirian keuangan sebesar 3,008. Koefisien β_3 sebesar 0,336 menunjukkan bahwa kenaikan ukuran pemerintah daerah akan meningkatkan kemandirian sebesar 0,336, sedangkan koefisien β_4 sebesar -0,001 menunjukkan bahwa penurunan *Leverage* akan meningkatkan kemandirian keuangan sebesar 0,001.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Nilai R^2 berada antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, artinya variabel independen mampu menjelaskan

variabel dependen dengan sangat baik. Sebaliknya, jika mendekati 0, artinya kemampuan penjelasannya sangat rendah.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.990803	Mean dependent var	0.339015
Adjusted R-squared	0.987083	S.D. dependent var	0.344558
S.E. of regression	0.016370	Sum squared resid	0.023850
F-statistic	266.3453	Durbin-Watson stat	2.333120
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan Tabel 7, nilai adjusted R^2 sebesar 0,987 menunjukkan bahwa 98,7% variasi kemandirian keuangan daerah dijelaskan oleh variabel kekayaan daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan *Leverage*, sementara sisanya 1,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji T (Parsial)

Uji T atau uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara individual atau satu persatu berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dengan cara melihat nilai signifikansi 0,05 dan membandingkan T hitung dengan T tabel.

Tabel 8 Hasil Uji Parsial (Uji-T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	2.548941	0.101128	25.20507	0.0000
X2	-3.008918	0.305749	-9.841149	0.0000
X3	0.336512	0.444364	0.757289	0.4509
X4	-0.001036	0.000568	-1.824921	0.0714
C	0.762572	1.063718	0.716893	0.4753

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8 variabel kekayaan daerah (X1) dan dana perimbangan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (t hitung $>$ t tabel; $\text{prob} < 0,05$), sedangkan ukuran pemerintah daerah (X3) dan *Leverage* (X4) tidak berpengaruh signifikan (t hitung $<$ t tabel; $\text{prob} > 0,05$). Dengan demikian, secara parsial hanya X1 dan X2 yang berpengaruh signifikan. Di antara variabel tersebut, kekayaan daerah (X1) merupakan variabel yang paling dominan karena memiliki nilai t hitung tertinggi.

Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang ada dalam penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ketentuan yang ditetapkan dalam pengujian simultan ini yaitu apabila nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . Untuk menentukan F_{tabel} dapat dilihat dari tabel signifikansi 0,05 dengan cara mengurangi jumlah respondend – Jumlah seluruh variabel maka didapatkan F_{tabel} sebesar 2,703

Tabel 9 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

R-squared	0.990803	Mean dependent var	0.339015
Adjusted R-squared	0.987083	S.D. dependent var	0.344558
S.E. of regression	0.016370	Sum squared resid	0.023850
F-statistic	266.3453	Durbin-Watson stat	2.333120
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025

Berdasarkan Tabel 9, nilai F_{hitung} sebesar 266,3453 lebih besar dari F_{tabel} 2,45, dengan probabilitas $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, variabel kekayaan daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan *Leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis regresi panel menunjukkan bahwa variabel Kekayaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dengan nilai t_{hitung} 25,205 > t_{tabel} 1,97976 dan probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi PAD sebagai indikator kekayaan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya PAD dalam mendukung kemampuan fiskal daerah secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer pusat.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pendapat (Halim, 2014) bahwa PAD mencerminkan kapasitas fiskal internal pemerintah daerah. Tingginya PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dapat dicapai melalui optimalisasi Sumber daya ekonomi lokal. Seperti dikemukakan Musgrave (1959), kekayaan daerah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Martini et al. (2019) di Sumatera Selatan dan Novitasari et al (2019), yang menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Semakin besar kontribusi PAD, semakin rendah ketergantungan terhadap transfer pusat. Oleh karena itu, daerah perlu memperkuat basis PAD melalui pengelolaan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis regresi panel metode FEM menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dengan t hitung $-9,841 < t$ tabel $1,97976$ dan probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin besar dana perimbangan yang diterima daerah, semakin rendah tingkat kemandirian fiskalnya. Ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat menurunkan insentif daerah untuk mengelola keuangan secara efisien dan menggali PAD, sehingga daerah cenderung pasif secara fiskal.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, dana perimbangan seharusnya berfungsi mengurangi ketimpangan antardaerah. Namun, jika tidak diiringi penguatan kapasitas fiskal lokal, transfer pusat justru menciptakan fiscal illusion, yakni persepsi keliru bahwa daerah memiliki Sumber daya yang besar padahal bukan hasil usaha sendiri. Hal ini berdampak pada lemahnya inovasi penerimaan daerah, pemborosan anggaran, dan menurunnya akuntabilitas (Mourao, 2008)

Temuan ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya. Machfud et al. (2021) menunjukkan bahwa dana perimbangan cenderung digunakan untuk belanja rutin, bukan pembangunan strategis. Nurliza et al. (2020) juga mencatat bahwa ketergantungan pada dana pusat menurunkan motivasi daerah dalam meningkatkan PAD. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem fiskal lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat guna mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil regresi panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dengan t hitung $0,757 < t$ tabel $1,97976$ dan probabilitas $0,451 > 0,05$. Meskipun koefisien regresinya positif ($0,336512$), pengaruhnya secara statistik lemah. Artinya, peningkatan

total aset daerah tidak secara otomatis meningkatkan kemampuan pembiayaan melalui PAD, yang mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan aset.

Menurut Damanpour (1991), ukuran pemerintah daerah seharusnya mencerminkan kapasitas kelembagaan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Namun, besarnya aset tidak menjamin kinerja keuangan yang baik jika tidak dikelola secara produktif. Aset yang tidak dimanfaatkan atau tidak terdokumentasi dengan baik justru menjadi beban fiskal (Sidik, 2017). Hal ini menegaskan pentingnya efektivitas dalam pengelolaan aset dibanding sekadar kuantitas.

Temuan ini sejalan dengan Rofiq et al. (2021) yang menyebutkan bahwa lemahnya pengelolaan aset membuat ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. (Aditya et al., 2024) juga menekankan bahwa tidak semua aset besar dapat dikonversi menjadi penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengutamakan pengelolaan aset yang akuntabel, efisien, dan produktif agar dapat menjadi Sumber PAD yang berkelanjutan.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis regresi panel FEM menunjukkan bahwa variabel *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dengan t hitung $1,824 < t$ tabel $1,97976$ dan probabilitas $0,071 > 0,05$. Meskipun koefisien regresinya negatif ($-0,001036$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan *Leverage* cenderung menurunkan kemandirian fiskal, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pembiayaan utang belum menjadi faktor dominan yang memengaruhi kemandirian daerah.

Secara teoritis, *Leverage* mencerminkan ketergantungan fiskal terhadap pembiayaan eksternal. Tingginya *Leverage* dapat mengurangi ruang fiskal karena sebagian anggaran dialokasikan untuk membayar utang dan bunga, sehingga menghambat belanja produktif (Halim et al., 2006). Namun, dalam konteks kota-kota di Pulau Sumatera, *Leverage* belum menjadi faktor utama yang memengaruhi kemandirian fiskal, kemungkinan disebabkan oleh regulasi ketat, keterbatasan kapasitas administratif, atau risiko politik (Khurria, 2023).

Temuan ini konsisten dengan penelitian Islami et al. (2020) dan Warman et al. (2024) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal

di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dampak *Leverage* sangat bergantung pada konteks penggunaannya dan kualitas perencanaan fiskal di masing-masing daerah.

Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan *Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil regresi data panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan nilai F-statistic sebesar 266,3453 dengan Prob (F-statistic) $0,000000 < 0,05$, yang berarti variabel Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dipengaruhi oleh kombinasi berbagai aspek keuangan, sehingga pengelolaan fiskal perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Temuan ini sejalan dengan efektivitas otonomi fiskal yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam memaksimalkan Sumber daya lokal, efisiensi pengeluaran, optimalisasi aset, dan pengelolaan transfer serta utang (World Bank Group, 2021) Oleh karena itu, kewenangan fiskal harus diimbangi dengan kemampuan institusional yang memadai.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Julianti et al. (2024), Ramlah et al. (2023), dan Artya et al. (2020), yang menyimpulkan bahwa variabel kekayaan daerah, dana perimbangan, ukuran daerah, dan *Leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Temuan ini menegaskan bahwa keempat variabel tersebut merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal daerah dan dalam merancang kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan kemandirian keuangan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah kota di Pulau Sumatera dipengaruhi secara signifikan oleh kekayaan daerah dan dana perimbangan. Kekayaan daerah berpengaruh positif, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal. Ukuran pemerintah daerah dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan, namun secara simultan keempat variabel berpengaruh terhadap kemandirian

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan PAD, mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, serta menggunakan *Leverage* secara bijak. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain dan memperluas cakupan analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Syafri, R., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(4), 277–290. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i4.858>
- Arpani, W. N., & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah : (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2(Vol 2 No 1 (2020)), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Artya Rahma Putri, R., & Lailatul Amanah, D. (2020). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–16.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=yTVSqmfge8C>
- Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators. *The Academy of Management Journal*, 34(3), 555–590. <https://doi.org/10.2307/256406>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik : Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi). Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53–64.
- Islami, A., Frymaruwah, E., & Mayasari, R. (2020). Factors influencing the financial performance of South Sumatra Province local government for the period 2012–2016. *Journal of Critical Reviews*, 7(15), 2115–2124. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.15.282>
- Julianti, H., Agustina, F., & Khoiriyah, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(2), 141–152. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i2.1100>
- Khurria, A. (2023). Mengapa Pemerintah Daerah Belum Berhasil Menerbitkan Obligasi Daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(5), 594–611. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i5.595>
- Machfud, Asnawi, & Naz'aina. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan



- daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Manafe, H., Niha, S., & Putra, D. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541–547. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3.1322>
- Martini, R., Sari, K. R., Somadi, T., & Karman, I. W. (2019). Financial Independence of the South Sumatra Regional Government. *Proceedings of the International Conference On Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track (ICASTSS 2019)*, 41–45. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.75>
- Mourao, P. (2008). Towards a Puviani's Fiscal Illusion Index. *Hacienda Pública Española*, 187, 49–86. <https://doi.org/10.33324/hpe.v187.i4.59>
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill. <https://books.google.co.id/books?id=GQMdAAAAIAAJ>
- Mutaali, L. (2025, June). *Pendapatan Asli Daerah (PAD), cermin kemandirian daerah*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/luthfimutaali4996/683a308134777c76413785a2/pendapatan-asli-daerah-pad-cermin-kemandirian-daerah>
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh pajak, retribusi, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah. *INVENTORY : Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174–186.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 234–247.
- Porter, D. C., & Gujarati, D. N. (2008). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill Education. <https://books.google.co.id/books?id=zJIDPgAACAAJ>
- Ramlah, Sjarlis, S., & Salim Sultan, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Daerah dan Dana Transfer terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar. *Gendhera Buana Jurnal*, 1(3), 305–318. <https://doi.org/https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj/article/view/3745>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Rofiq, I., & Arza, F. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705–719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>
- Rosadi, R. R. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Tasikmalaya*. Universitas Tasikmalaya.



- Santoso, F. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Likuiditas, dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015–2016*. Universitas Atma Yogyakarta.
- Sidik, M. (2017, September 22). *Pengelolaan Aset dan Kebijakan Fiskal*. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-dan-Kebijakan-Fiskal.html>
- Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017). The Effect Of Local Government Characteristics And Financial Independence On Economic Growth And Human Development Index In Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(2), 65–71. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.2.65-71>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susan Nurjanah, R. (2025, April 10). *Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat>
- Warman, A., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(2), 178–188. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i2.46>
- World Bank Group. (2021). *Fiscal Decentralization, Local Public Sector Finance And Intergovernmental Fiscal Relations: A Primer*. International Monetary Fund.